

Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok

Yangga Pangestu*, Hendra Suherman, Rini Mulyani, Nasfryzal Carlo

Program Studi Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta Padang

*Correspondence email: yangga.pangestu@gmail.com

Abstrak, Salah satu langkah penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat adalah pembangunan perumahan dan permukiman yang tujuan utamanya adalah menyiapkan perumahan yang sejahtera dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai dan terjangkau. Penelitian ini bertujuan untuk dapat melihat sejauh mana efektifitas penerapan pelaksanaan program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) yang mengacu kepada petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan. Analisis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan mengambil indikator penilaian tentang rumah layak huni berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan, setelah itu dilakukan penyebaran kuesioner pada 26 rumah penerima bantuan, 14 rumah di Nagari Surian dan 12 rumah di Nagari lolo. Pengambilan sampel dengan menggunakan Skala Likert menggunakan Skala 5 yakni mulai dari Sangat Tidak Sesuai (STS) sampai dengan Sangat Sesuai (SS), agar proses pelaksanaan dapat berjalan dengan maksimal untuk dapat melihat ancaman yang terjadi dan juga melihat peluang untuk dapat mengoptimalkan proses pelaksanaan maka dilakukan juga analisis dengan Metode SWOT. Hasil studi menunjukkan penerapan indikator penilaian yang diambil dari petunjuk teknis pelaksanaan masuk kedalam kategori "sesuai" dimana untuk Nagari Surian berada pada angka 4.14 dari skala maksimum 5 dan untuk Nagari Lolo berada pada angka 4.16. Meskipun demikian, pada aspek penilaian akses air bersih di Nagari Lolo masuk dalam kategori "Cukup Sesuai" hal ini disebabkan karena belum semua rumah bisa dijangkau oleh air dari PDAM, sehingga masyarakat masih mengandalkan air bersih dari sumur warga atau sumber mata air. Hasil analisis untuk nilai keswadayaan juga sangat bagus karena nilai swadaya masyarakat yakni sebesar 83% - 94%, peran fasilitator juga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program BSPS karena bisa membantu masyarakat untuk memahami tujuan dari program BSPS itu sendiri.

Kata Kunci: Efektivitas, program BSPS, swadaya, rumah layak huni, permasalahan lapangan

***Abstract,** One important step in an effort to meet the housing needs of the community is the construction of housing and settlements whose main goal is to prepare prosperous housing with adequate and affordable infrastructure, facilities and utilities. This study aims to be able to see the extent of the effectiveness of the implementation of the self-help housing stimulant assistance program which refers to technical guidelines. The analysis uses a descriptive qualitative approach, by taking assessment indicators about habitable houses based on technical instructions for the implementation of activities, After that, questionnaires were distributed to 26 houses receiving aid, 14 houses in Nagari Surian and 12 houses in Nagari Lolo Sampling take with using a Likert Scale using a Scale of 5, starting from Very Unsuitable (STS) to Very Suitable (SS), so that the implementation process can run optimally to be able to see threats that occur and also see opportunities to be able to optimize the implementation process is carried out also analysis using the SWOT Method The results of the study show that the application of assessment indicators taken from technical implementation guidelines falls into the "appropriate" category where for Nagari Surian it is at 4.14 out of a maximum scale of 5 and for Nagari Lolo it is at 4.16. However, in the aspect of assessing access to adequate tap water in Nagari Lolo is included in the "Quite Appropriate" category, this is because not all houses can be reached by water from Water Suplly Company, so people still rely on tap water from residents' wells or spring sources. The results of the analysis for the value of self-help are also very good because the value of community self-help is 83% - 94%, The role of the facilitator is also very influential on the implementation of the self help housing stimulant assistant program because it can help the community to understand the purpose of the BSPS program itself.*

Keywords: Effectiveness, the self help housing stimulant assistant program, Self-help, livable houses, field problem

PENDAHULUAN

Rumah memiliki fungsi yang begitu besar dalam kehidupan manusia sehari-hari. Memiliki rumah yang layak dapat melindungi seseorang atau sekelompok orang dari segala macam bahaya. Namun masih banyak kondisi masyarakat yang hidup kurang sejahtera sehingga sulit untuk dapat membuat rumah layak huni, rumah layak huni seperti yang dimaksudkan dalam petunjuk teknis

pelaksanaan program BSPS meliputi: 1) komponen struktur bangunan (pondasi, sloof, kolom/tiang, ring balok, kerangka atap) dan kualitas bahan penutup atap, lantai, dinding, 2) kecukupan minimum luas bangunan 3) akses sanitasi 4) akses air minum. Salah satu langkah penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat adalah pembangunan dan pembangunan perumahan dan permukiman yang tujuan utamanya adalah menyiapkan perumahan yang sejahtera dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai dan terjangkau. Sebagai badan pengambil keputusan, pemerintah telah mengembangkan program yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan dengan memberikan pemberdayaan yang berkelanjutan. Pemerintah tidak hanya mengembangkan program yang terfokus pada bantuan stimulus ekonomi dan bisnis, namun realisasi perumahan yang layak bagi masyarakat miskin tidak luput dari perhatian pemerintah, salah satunya adalah BSPS. BSPS merupakan salah satu penjabaran dari kebijakan nasional dalam Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat 2010-2014, dan pembangunan perumahan dan pemukiman masih menghadapi tiga masalah utama, yaitu: 1) ketersediaan perumahan yang terbatas, 2) peningkatan hunian tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat serta prasarana, sarana lingkungan dan penunjang utilitas, dan 3) semakin maraknya permukiman kumuh. Tujuan program tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2018. Pedoman No. 14 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya dirancang untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 13/PRT/M/2016, yang menyatakan dalam pasal Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya, BSPS adalah bantuan pemerintah dalam bentuk stimulus terhadap masyarakat yang berpendapatan rendah untuk meningkatkan swasembada untuk pengembangan/perbaikan kualitas rumah dan infrastruktur, fasilitas dan utilitasnya. Namun masih banyak masyarakat yang tidak dapat menikmati program ini karena tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Dirjen Perumahan, seperti pada penelitian (Dharma dan Bangun, 2022) yang menyebutkan adanya masyarakat yang tidak bisa ikut program ini karena tidak memiliki sertifikat tanah dikarenakan rumah dan tanah yang ditempati diperoleh secara turun temurun. Masalah waktu pelaksanaan dan material juga sering menjadi penyebab keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan, (Ardiyanti dan Widjonarko, 2017) mengatakan material sempat terlambat antara 1 – 6 minggu dari waktu yang telah disepakati sehingga terjadi keterlambatan dalam waktu pelaksanaan. Kecamatan Pantai Cermin dengan luas 366 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 22.281 jiwa yang didominasi oleh penduduk yang berprofesi sebagai petani (BPS, 2021).



Gambar 1. Rumah dengan struktur bangunan, pencahayaan, sanitasi yang sangat tidak memadai
Sumber: Pangestu. Y, 2023 (Dokumen Pribadi)

Banyak keluarga yang bisa dikategorikan kedalam masyarakat berpenghasilan rendah sehingga banyak yang masih tinggal dirumah yang bisa dikatakan tidak layak huni, seperti struktur rumah yang masih tidak mempunyai pondasi, kolom yang tidak ada, dinding yang masih terbuat dari kayu yang hanya dipakukan diantara pertemuan sudut kolom, tidak adanya MCK, luas bangunan yang kurang dari standar rumah layak huni, maka perlu dilaksanakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) agar masyarakat dapat tinggal dirumah yang layak huni. Seperti dapat dilihat pada gambar dibawah ini bahwa rumah yang ditempati masyarakat rumah semi permanen, tidak adanya MCK, ruang yang sempit. Pada proses pelaksanaan kegiatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR mengeluarkan surat edaran tentang bagaimana standar konstruksi bangunan, seperti dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Standar Pedoman Rumah Layak Huni BSPS

Komponen Standar	Indikator Standar	Komponen Standar	Indikator Standar
Ketahanan bangunan	Syarat kekuatan bangunan mencakup standar kekuatan komponen struktur dan non struktur suatu bangunan. Untuk komponen struktur bangunan mencakup, sloof, kolom/tiang, balok dan rangka struktur atap. Sedangkan bagian kualitas struktur suatu bangunan terdiri dari dimensi, adukan campuran atau bahan bangunan, dan pengikat antar bagian-bagian dari struktur struktur tersebut. Sedangkan bagian-bagian non struktur bangunan terdiri dari lantai, dinding, kusen, daun pintu serta jendela, dan pelindung atap.	Akses air minum layak	Untuk sarana air minum layak terdiri dari terpenuhinya akses air minum yang mudah dijangkau dari sisi waktu atau jarak tempuh.
Kecukupan luas tempat tinggal	Untuk syarat minimum luas bangunan yang mencukupi dapat dilihat dari terpenuhinya standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan tempat tinggal. Untuk kecukupan minimum luasan bangunan per-orang dihitung 7,2 meter persegi dengan tinggi ruang minimal 2,8 meter. Pemenuhan luasan rumah dapat dilihat dari ketersediaan lahan dan kemampuan untuk swadaya.	Akses pencahayaan dan penghawaan	Sarana penghawaan dapat dihitung dengan minimal 5% (lima persen) dari luas lantai ruangan seperti bukaan jendela dengan mempertimbangkan sirkulasi udara. Untuk sarana pencahayaan setidaknya memiliki minimal 10% (sepuluh persen) dari luas lantai bangunan dengan memperhatikan sinar matahari yang masuk kedalam ruangan.
Akses sanitasi layak	Sanitasi yang layak terdiri dari bangunan sebagai tempat untuk mandi, cuci, kakus, serta septictank yang layak, tempat pembuangan sampah, saluran untuk pembuangan air kotor, dan sistem pembuangan air limbah. Sanitasi bisa dibuat di dalam rumah, pekarangan rumah, atau komunal (secara berkelompok) dengan jarak yang terjangkau dan dapat melayani seluruh anggota keluarga.		

Sumber: Petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya tahun 2021



Gambar 2. Rumah dengan luas bangunan yang kurang memadai

Sumber: Pangestu. Y, 2023 (Dokumen Pribadi)

(Jannah *et al*, 2023) mengemukakan bahwasanya pada saat pelaksanaan program BSPS di Desa Siwalempu ada beberapa temuan dari hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai standar seperti: 1) Dimensi pondasi yang kurang dalam / kurang lebar, 2) Ikatan antara pondasi dengan sloof tidak ada, 3) Dimensi sloof yang tidak memenuhi standar, 4) Rumah tembok yang menggunakan kolom kayu, 5) Dimensi kolom yang tidak sesuai standar, 6) Diameter tulangan utama yang kurang dari 10 mm, 7) Diameter tulangan utama kurang dari 10 mm dan tulangan sengkang kurang dari 8 mm, dan 8) Jarak antar sengkang yang lebih dari 15 cm. Menurut (Kumar dan Dina, 2020) fungsi kolom sangat berpengaruh, karena banyak bangunan yang runtuh apabila terjadi bencana alam seperti gempa karena pada sudut pertemuan dinding tidak diberi kolom struktur. Selain aspek struktur aspek sanitasi juga sangat penting bagi rumah layak huni, (Rahmayani, 2019) mengatakan masih banyak rumah yang sudah selesai dibangun tapi tidak memiliki sanitasi dikarenakan kurangnya sosialisasi dan juga

keterbatasan biaya. Efektivitas bisa dilihat sebagai salah satu sebab dari factor yang lain. Efektivitas dapat juga dikatakan bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya bisa tercapai atau dengan kata lain sasaran dapat dicapai karena ada suatu tahapan kegiatan. Kata efektivitas tidak bisa disamakan dengan efisiensi, karena keduanya mempunyai arti yang berbeda meskipun dalam berbagi penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektivitas. Efisiensi dapat diartikan sebagai perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dapat dikaitkan dengan tercapainya tujuan. Kamus Ilmiah Populer mengartikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau mendukung tujuan. Efektifitas termasuk salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu tertuju kepada tercapainya kinerja yang maksimal, pencapaian target yang berhubungan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Robbins dalam (Iskandar, 2018) memaparkan pengertian efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan juga jangka panjang. Maksudnya ialah efektivitas merupakan sebuah standar pengukuran untuk menggambarkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam meraih sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengevaluasi jalannya suatu organisasi, bisa dilakukan lewat konsep efektivitas. Konsep ini merupakan salah satu variabel untuk dapat menentukan apakah perlu dilaksanakan perubahan secara optimal terhadap bentuk, atau manajemen organisasi. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, dilihat dari sisi masukan (*input*) maupun keluaran (*output*). (Nursifa, 2021) Mengemukakan pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya secara organisasi dan sumber daya manusia telah terlaksana dengan baik karena pemerintah dan fasilitator berkolaborasi dengan baik dalam menerapkan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien apabila dilaksanakan dengan benar dan sesuai prosedur, sedangkan efektif apabila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan dapat memberikan hasil yang bermanfaat. Tingkat efektifitas bisa juga diukur dengan melakukan perbandingan antara rencana atau target yang ditetapkan dengan hasil tercapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dapat dikatakan efektif, namun apabila usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai seperti apa yang direncanakan, maka hal itu bisa dikatakan tidak efektif. (Malkanov dan Mayani, 2021) Menerangkan bahwa pada proses pelaksanaan program BSPS di Kecamatan Singingi berjalan tidak efektif karena berasal dari sumber daya manusianya seperti, kurangnya pendampingan dilapangan oleh fasilitator, kurangnya tingkat keswadayaan oleh masyarakat penerima bantuan, terlambatnya suplai material oleh toko bangunan yang ditunjuk sehingga waktu pelaksanaan tidak dapat berjalan selesai sesuai rencana. Mengacu pada materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman intinya keikutsertaan masyarakat tidak hanya dalam upaya terpenuhinya rumah secara fisik namun juga meliputi semua proses mulai dari perencanaan sampai pengawasan. (Rismanita *et al*, 2020) Menjelaskan bahwa ada beberapa pendekatan agar program ini dapat terlaksana dengan baik, Pendekatan didalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) seperti berikut: Pemberdayaan masyarakat, artinya seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan (persiapan, perencanaan, pelaksanaan, kontrol, dan perawatan) mengikutsertakan peran aktif masyarakat. Keberpihakan kepada orang miskin, artinya adaptasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil diusahakan memberikan dampak langsung bagi penduduk miskin. Otonomi dan desentralisasi, artinya pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan kegiatan dan kelanjutan rumah terbangun. Partisipatif, artinya masyarakat khususnya kelompok miskin, kaum perempuan serta kelompok minoritas, diberikan akses untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan, dan pemanfaatan. Keswadayaan, artinya masyarakat yang mandiri menjadi faktor utama dalam berhasilnya tahapan pelaksanaan kegiatan BSPS. Penguatan kapasitas lembaga, artinya pelaksanaan kegiatan diusahakan dapat mendorong tercapainya kemandirian pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan *stakeholder* lainnya dalam pengentasan masalah kemiskinan. Kesetaraan dan keadilan gender, artinya pelaksanaan kegiatan mendorong tercapainya kesetaraan antara pria dan wanita dalam tiap tahapan kegiatan dan pemanfaatannya.

Pada program BSPS Swadaya partisipasi masyarakat juga sangat berpengaruh agar program ini dapat berlangsung untuk bisa mencapai target rumah layak huni, namun masih banyak masyarakat yang kurang memahami maksud dari keswadayaan. (Puryanto dan Rosadi, 2021) mengatakan sosialisasi juga sangat penting dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat baik melalui pemerintah daerah atau fasilitator yang terlibat dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

agar masyarakat paham bahwasanya ini adalah program bantuan stimulan bukan bedah rumah seperti yang selama ini banyak ditemui dilapangan. (Rizky *et al*, 2022) pada awal pelaksanaan program BSPS di Provinsi Sumatera Utara kurang berjalan dengan baik karena masyarakat kurang aktif melakukan keswadayaan sehingga ditakutkan sasaran rumah layak huni tidak tercapai, namun setelah dilakukan pendampingan secara berkala tingkat kurangnya partisipasi atau keswadayaan masyarakat dapat diminimalisir. (Esariti *et al*, 2020) juga mengemukakan fungsi fasilitator juga sangat berperan penting agar program ini dapat berjalan dengan baik seperti memberikan penyuluhan kepada masyarakat penerima bantuan agar masyarakat paham apa maksud dan tujuan dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Menurut (Siregar dan Fardila, 2019) realita dilapangan masih banyak rumah yang sudah mendapatkan bantuan masih terbilang belum layak huni seperti belum mempunyai MCK yang memadai, dinding rumah yang belum diplester serta masih mengandalkan semua pekerjaan yang bergantung kepada tukang. Program ini belum bisa dikatakan tepat sasaran yang seharusnya menjadi penerima bantuan adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR), namun banyak penerima adalah masyarakat yang berkecukupan dan mempunyai tempat tinggal yang layak (Herlina *et al*, 2021), juga mengemukakan kurang tepatnya sasaran penerima bantuan program ini yang mana didalam aturan seharusnya yang menikmati bantuan ini adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah namun rata-rata penerima bantuan adalah masyarakat yang berkecukupan dalam hal ekonomi dan juga memiliki rumah yang layak huni. (Farida, 2020) Mengemukakan perlunya sosialisasi yang lebih lama sebelum program ini dapat terlaksana agar masyarakat paham bagaimana sebenarnya program BSPS ini, dan pendampingan yang terus menerus kepada masyarakat penerima bantuan agar program BSPS dapat berjalan sesuai dengan rencana yang digagas oleh Pemerintah. Dengan adanya sosialisasi yang baik dan pendampingan secara berkelanjutan dapat membuat pelaksanaan BSPS berjalan dengan baik, seperti yang dikatakan oleh (Setiyarini dan Prathama, 2019) penetapan calon penerima bantuan telah sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dirjen Perumahan dimana program dapat berjalan dengan cepat karena PPK langsung mengevaluasi proposal penerima bantuan sehingga kegiatan pelaksanaan program BSPS dapat segera dimulai, dan dari segi pemanfaatan bantuan juga sudah sesuai dengan petunjuk teknis dimana masyarakat yang menerima bantuan mau melakukan swadaya agar bisa menutupi kekurangan biaya supaya tujuan program dapat terlaksana dengan baik.

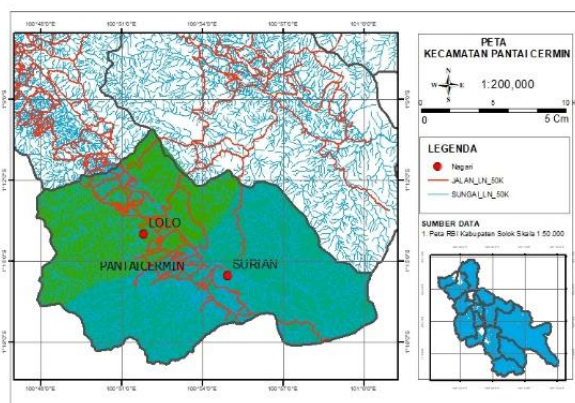
METODE

Suatu penelitian merupakan proses yang terdiri dari beberapa tahap. Tiap tahapan merupakan bagian yang menentukan untuk menjalankan tahapan selanjutnya. Teori-teori yang telah ada merupakan dasar dalam melaksanakan penelitian serta mengacu pada latar belakang dan tujuan yang hendak dicapai. Untuk mendapatkan penelitian yang baik, dibutuhkan suatu urutan langkah yang cermat. Hal ini dikarenakan penelitian ialah suatu proses yang saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga setiap langkah perlu dilaksanakan secara cermat. Oleh karena itu pada Bab III ini berisi tentang metodologi penelitian yang akan menjelaskan tempat dan waktu penelitian, variabel penelitian yang mencakup data – data yang digunakan dalam penelitian ini, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data serta diagram alir penelitian. Penelitian ini dilakukan di Nagari Surian dan Nagari Lolo Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok Sumatera Barat. Kecamatan Pantai Cermin memiliki 2 buah nagari yaitu Nagari Surian dan Nagari Lolo yang memiliki luas 366 Km² dengan berbatasan disebelah Utara dengan Kecamatan Lembah Gumanti, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Hiliran Gumanti (Statistik, 2021). Pada penelitian ini akan diambil sampel sebanyak 26 rumah yang terdapat di Nagari Surian 14 rumah dan 12 rumah di Nagari Lolo. Seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Daftar Penerima Bantuan BSPS Kecamatan Pantai Cermin Tahun 2023

Nama Nagari	Jumlah Penerima Bantuan
Surian	14 rumah
Lolo	12 rumah
Total	26 rumah

Sumber: Data penerima bantuan BSPS Kecamatan Pantai Cermin Tahun 2023



Gambar 3. Peta Administrasi Kecamatan Pantai Cermin

Sumber: Pangestu, Y, 2023 (Pengolahan dengan ArcGis)

Metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah sebagai berikut: Observasi yaitu melaksanakan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian. Penulis melihat secara langsung bagaimana keadaan sebenarnya rumah sederhana yang berada di Kecamatan Pantai Cermin (Nagari Surian dan Nagari Lolo). Kuesioner ini didapat dari pustaka acuan dan penelitian terdahulu yang saling berkaitan Kuesioner adalah melaksanakan pengumpulan data dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada responden. dengan penelitian. Dengan adanya kuesioner ini responden bisa lebih memahami tujuan dari penelitian ini. Pemberian pertanyaan (kuesioner) dilakukan dengan secara tatap muka langsung dengan responden, dimana yang menjadi responden adalah masyarakat penerima bantuan dan fasilitator yang mendampingi pelaksanaan program BSPS dan terlibat langsung dilapangan. Wawancara dilakukan untuk dapat mengetahui permasalahan yang terjadi selama proses pelaksanaan agar dapat menngambil langkah – langkah yang dibutuhkan agar tujuan dari program BSPS dapat tercapai, dimana narasumber adalah orang – orang yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan, disini penulis mewawancarai pihak Wali Nagari yakni Wali Nagari Surian dan Wali Nagari Lolo dan juga mewawancarai fasilitator yang mendampingi masyarakat dari awal pengusulan penerima bantuan hingga selesai. Metode pengambilan data yang dipakai pada penelitian ini yaitu metode kuisioner bertipe pilihan, karena lebih mudah didalam memberikan jawaban dan waktu yang lebih singkat, maka diharapkan dapat memberikan jawaban sesuai dengan pengalamannya. Dokumentasi diambil untuk dapat melihat hasil realisasi pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Data yang diambil melalui dokumentasi yang bertujuan melengkapi data penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, data dapat berupa sejarah, profil, file dan foto. Dokumetasi yang diambil berupa data penerima bantuan yang didapatkan dari fasilitator dan juga foto pelaksanaan. Setelah dilakukan pengumpulan data dengan melakukan penyebaran kuesioner dan didapatkan data maka akan dilakukan pengolahan data menggunakan aplikasi *Microsoft Excel*, dari data hasil penelitian dijabarkan didalam skor yang tertinggi hingga terendah (Widoyoko 2022:111). Setelah jarak interval didapat maka akan dapat mengukur bagaimana pengaplikasian standar bangunan ramah gempa yang dikeluarkan oleh Pemerintah apakah sudah sesuai apa belum.

Tabel 3. Indikator Penilaian Kuesioner

Indikator Penilaian		
Ketahanan bangunan		Akses air minum yang layak
1	Apakah bangunan rumah mempunyai pondasi batu kali	10
2	Apakah bangunan rumah mempunyai sloof beton	
3	Apakah bangunan rumah mempunyai kolom beton	11
		Akses pencahayaan dan penghawaan
		Apakah rumah memiliki sarana penghawaan yang cukup (minimal 5% dari luas lantai)
		Luas total jendela
4	Apakah bangunan rumah mempunyai balok/ring balok beton	12
		Apakah rumah memiliki sarana pencahayaan yang cukup (minimal 10% dari luas lantai)
		Luas total jendela
5	Apakah bangunan rumah mempunyai rangka atap	
		Keswadayaan

Kecukupan ruang atau luas minimum bangunan	13	Apakah ada partisipasi penerima bantuan (Kecukupan lahan, material, tenaga)
6	Apakah luas ruangan cukup untuk anggota penghuni rumah (dengan luas perorang 7.2 m ² dan tinggi ruang min 2.8 m) Jumlah anggota keluarga Luas rumah	
	Akses sanitasi yang layak	
7	Apakah rumah memiliki saluran pembuangan air kotor	
8	Apakah rumah memiliki sarana mandi, cuci, kakus	
9	Apakah rumah memiliki <i>septic tank</i>	

Sumber: Petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan bantuan stimulant perumahan swadaya tahun 2021

Setelah dilakukan penyebaran kuesioner maka akan dilakukan analisis menggunakan skala likert dengan skala 5 (lima) dengan diklasifikasikan menjadi: 1) sangat sesuai (SS), 2) sesuai (S), 3) cukup sesuai (CS), 4) tidak sesuai (TS), 5) sangat tidak sesuai (STS). Setelah dilakukan analisis dari kuesioner yang telah disebarakan selanjutnya juga akan dilakukan analisis menggunakan metode SWOT untuk dapat membantu bagaimana cara terbaik saat ini agar pelaksanaan program BSPS dapat berjalan maksimal, merancang strategi agar program BSPS dapat berjalan dengan baik, mencari tahu hal-hal yang bisa menghambat tujuan maupun pelaksanaan program BSPS, mencari tahu peluang apa yang bisa dimanfaatkan untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan program BSPS agar sesuai dengan petunjuk teknis yang telah dikeluarkan oleh pemerintah agar masyarakat dapat memiliki rumah yang layak huni. Untuk dapat mengambil kebijakan dari faktor internal untuk menghadapi permasalahan yang akan timbul dari luar maka dilakukan strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan cara sebagai berikut: (1) Strategi SO: dilakukan untuk memperoleh alternatif efisien dengan menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal. (2) Strategi WO: dilakukan dengan menopang kelemahan internal untuk mengambil keuntungan dari kesempatan eksternal, (3) Strategi ST: dilakukan dengan menggunakan kekuatan internal untuk mengurangi ancaman eksternal, dan (4) Strategi WT: untuk memperoleh alternatif defensif dengan memanfaatkan kelemahan internal untuk meminimalisir ancaman eksternal.

HASIL

Pada saat proses pengambilan data penulis melakukan observasi langsung kelapangan tempat penerima bantuan BSPS didampingi oleh fasilitator yang terlibat langsung pada program ini, dimana fasilitator pada program ini terdiri dari dua orang fasilitator yakni fasilitator Teknik dan fasilitator pemberdayaan, fasilitator Teknik berfungsi untuk menghitung biaya anggaran untuk pekerjaan dan juga memonitor proses pelaksanaan agar sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan, dan fasilitator pemberdayaan berfungsi untuk membantu Masyarakat membuat laporan administrasi penggunaan dana, dimana untuk fasilitator Teknik berasal dari jurusan Teknik Sipil dan untuk fasilitator pemberdayaan berasal dari jurusan S1 Ekonomi, Meskipun semua proses pelaksanaan berjalan sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan pemerintah, pada proses pelaksanaan BSPS ini tak luput juga dari kendala, seperti yang dihadapi oleh beberapa penerima bantuan tentang susahny mencari tukang untuk bekerja pada rumah mereka karena tidak semua orang punya kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi dan faktor cuaca juga menjadi penghalang pada proses pelaksanaan



Gambar 4. Pengambilan data penerima bantuan dan kunjungan lapangan didampingi oleh fasilitator BSPS

Sumber: Pangestu, Y, 2023 (Dokumen Pribadi)

Pada proses analisis data diambil berdasarkan kuesioner yang telah disebarikan kepada responden yakni masyarakat penerima bantuan BSPS yang terdiri dari 13 buah pertanyaan, setelah dilakukan penyebaran kuesioner berikut hasil dari isi kuesioner tersebut:

Tabel 4. Analisis Data Pelaksanaan BSPS di Nagari Surian

Analisis Data Nagari Surian			
Butir Pertanyaan	Nilai Skor	Rerata Jawaban	Kategori
X1	56	4.00	Sesuai (S)
X2	56	4.00	Sesuai (S)
X3	56	4.00	Sesuai (S)
X4	56	4.00	Sesuai (S)
X5	56	4.00	Sesuai (S)
X6	65	4.64	Sangat Sesuai (SS)
X7	56	4.00	Sesuai (S)
X8	56	4.00	Sesuai (S)
X9	56	4.00	Sesuai (S)
X10	50	3.57	Sesuai (S)
X11	68	4.86	Sangat Sesuai (SS)
X12	59	4.21	Sesuai (S)
X13	65	4.64	Sangat Sesuai (SS)
Total	755	4.14	Sesuai (S)

Sumber: Hasil Analisis Data

Secara keseluruhan efektifitas pelaksanaan program BSPS yang dilaksanakan di Nagari Surian bisa dikatakan “Sesuai” karena rerata jawaban keseluruhan adalah 4.1 yang terletak antara kelas interval $>3.4 - 4.2$ dan untuk nilai swadaya pada proses pelaksanaan BSPS di Nagari Surian berkisar antara Rp. 163.440.000,00 sampai dengan Rp. 254.240.000,00. Dimana nilai persentase swadaya berkisar antara 89% sampai dengan 93%.

Tabel 5. Analisis Data Nagari Lolo

Analisis Data Nagari Lolo			
Butir Pertanyaan	Nilai Skor	Rerata Jawaban	Kategori
X1	48	4.00	Sesuai (S)
X2	48	4.00	Sesuai (S)
X3	48	4.00	Sesuai (S)
X4	48	4.00	Sesuai (S)
X5	48	4.00	Sesuai (S)
X6	60	5.00	Sangat Sesuai (SS)
X7	48	4.00	Sesuai (S)
X8	48	4.00	Sesuai (S)
X9	48	4.00	Sesuai (S)
X10	39	3.25	Cukup Sesuai (CS)
X11	57	4.75	Sangat Sesuai (SS)
X12	50	4.17	Sesuai (S)
X13	59	4.92	Sangat Sesuai (SS)
Total	649	4.16	Sesuai (S)

Sumber: Hasil Analisis Data

Secara keseluruhan efektifitas pelaksanaan program BSPS yang dilaksanakan di Nagari Lolo bisa dikatakan “Sesuai” karena rerata jawaban keseluruhan adalah 4.2 yang terletak antara kelas interval $>3.4 - 4.2$ dan untuk nilai swadaya dari masyarakat penerima bantuan berkisar antara Rp. 95.340.000,00 sampai dengan Rp. 290.560.000,00. Dimana untuk nilai swadaya masyarakat penerima bantuan BSPS di Nagari Lolo berkisar antara 83% sampai dengan 94%. Proses pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Pantai Cermin tahun anggaran 2023 berjalan dengan baik, karena dari hasil penilaian kuesioner semua indikator penilaian berada pada kategori Sesuai (S) dimana nilai rerata jawaban kuesioner di Nagari Surian yakni 4.1 dan Nagari Lolo 4.2 yang berada pada rentang nilai $>3.4 - 4.2$, seperti dapat dilihat pada aspek ketahanan bangunan dimana semua indikator penilaian seperti pondasi yang terbuat dari batu kali, sloof, kolom, balok/ring balok yang terbuat dari beton dengan diameter besi yang dipakai untuk tulangan utama adalah besi Ø

10 mm dan tulangan sengkang besi dengan diameter \varnothing 8 mm dengan jarak antar sengkang maksimal 15 cm dan atap yang mempunyai rangka dari kayu dan juga penutup atap yang menggunakan seng,



Gambar 5. Diameter tulangan dan jarak sengkang pada sloof dan ring balok
Sumber: Pangestu. Y, 2023 (Dokumen Pribadi)

Namun pada indikator penilaian akses air minum yang layak di Nagari Lolo skor rerata adalah 3.25 yang berada pada rentang >2.6 s/d 3.4 yang termasuk kedalam kategori “Cukup Sesuai” hal ini disebabkan di Nagari Lolo masih banyak masyarakat yang air bersihnya masih mengambil air sawah



Gambar 6. Rumah penerima bantuan yang dilengkapi pondasi batu kali, sloof, kolom dan ring balok
Sumber: Pangestu. Y, 2023 (Dokumen Pribadi)



Gambar 7. Rumah salah satu penerima bantuan yang rangka atap dan atapnya telah selesai dikerjakan.

Sumber: Pangestu. Y, 2023 (Dokumen Pribadi)

Untuk kebutuhan MCK atau mata air yang diambil menggunakan slang untuk air minumnya. Juga telah dilakukan wawancara dengan pihak Nagari yakni Nagari Surian sebagai berikut: (1) Pelaksanaan sosialisasi sudah dilakukan dengan baik diawal sebelum proses pelaksanaan kegiatan namun setelah berjalannya pekerjaan masih banyak yang tidak konsisten terhadap kesepakatan yang

telah dibuat diawal, seperti pada awal sosialisasi rumah yang dibangun ukurannya sudah ditetapkan namun setelah proses pelaksanaan ukuran rumah malah diperbesar sehingga menambah biaya untuk pembelian material. (2) Banyak masyarakat yang seharusnya masuk dalam kategori penerima bantuan tetapi karena mereka tinggal di tanah ulayat yang tidak mempunyai surat kepemilikan atau alas hak, maka dipending dulu untuk menerima bantuan sampai keluar aturan yang memperbolehkan mereka bisa menerima bantuan atau mereka mengurus alas hak katas tanah tersebut terlebih dahulu. (3) ketidaktahuan masyarakat tentang bantuan BSPS seperti adanya tanggung renteng sehingga apabila ada anggota kelompok yang progress pekerjaannya belum bisa untuk melakukan pencairan dana dapat menghambat proses pelaksanaan kegiatan. Dan untuk Nagari Lolo pada saat proses pelaksanaan masih didapati kendala sebagai berikut: (1) terkait masalah tanah, ada masyarakat yang yang seharusnya layak untuk mendapatkan bantuan tapi karena tinggal diatas tanah ulayat atau pusaka tinggi maka tanah tersebut tidak mempunyai sertifikat atau alas hak sehingga untuk masyarakat yang mengalami permasalahan tersebut harus ditunda untuk menerima bantuan sampai ada kejelasan tentang surat tanah tersebut, (2) untuk swadaya ada masyarakat pada saat proses pelaksanaan melakukan gotong royong yang dibantu oleh saudara – saudaranya namun ada juga masyarakat yang hanya mengandalkan tukang dan anggota keluarga sehingga pekerjaan tidak dapat cepat terselesaikan, (3) distribusi bahan bangunan yang sulit karena rumah berada ditengah persawahan sehingga material baik semen, batako, pasir harus diangkut secara manual menggunakan tenaga manusia, (4) SDM yang masih belum memahami tujuan dari BSPS seperti pada saat awal sosialisasi rumah yang dibangun disarankan maksimal 36 M² tanpa kamar namun pada saat proses pelaksanaan nyatanya banyak ditemukan masyarakat yang memperbesar ukuran rumah dan membuat kamar sehingga kekurangan dana dan menyebabkan proses pelaksanaan terlambat untuk melakukan pencairan dana, dan juga masalah inkonsistensi tentang aturan pelaksanaan BSPS masih terjadi. Namun dari pihak Nagari membantu mencari solusi dari permasalahan tersebut seperti membantu mengutangkan material kepada toko bangunan agar proses pelaksanaan tidak terganggu.

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian terdahulu pelaksanaan program BSPS di Kecamatan Pantai Cermin lebih baik dari pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Jannah *et al*, 2023) dimana pada proses pelaksanaan BSPS di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol masih ada rumah yang menggunakan kolom dari kayu, diameter tulangan utama yang kurang dari 10 mm dan diameter tulangan sengkang yang kurang dari 8 mm, jarak antar sengkang yang lebih dari 15 cm dimana pekerjaan ini tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan kegiatan BSPS yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yakni Direktorat Jenderal Perumahan yang bernaung dibawah Kementerian PUPR.

Setelah dilakukan pengamatan langsung kelapangan dengan didampingi oleh fasilitator yang terlibat langsung dalam program BSPS melalui observasi dan wawancara kepada pihak – pihak yang terlibat langsung maka terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program BSPS ini, sehingga dianalisa cara untuk menghadapi permasalahan tersebut:

Strategi SO (Strenghts & Opportunities)

Fasilitator dapat mengarahkan masyarakat penerima bantuan dalam membuat alur proses pelaksanaan supaya pada proses pelaksanaan bisa berjalan sesuai aturan dan target yang sudah ditetapkan, Adanya ketersediaan dana untuk proses pelaksanaan BSPS dan adanya pendamping (fasilitator) dapat membuat pelaksanaan program BSPS dapat berjalan dengan baik sehingga masyarakat mengerti bagaimana tujuan dari program BSPS. Adanya dana pendamping untuk operasional juga sangat membantu agar pihak Pemerintah Pusat dapat berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah tentang program BSPS baik pemerintah pusat yang turun langsung atau diwakili oleh fasilitator.

Strategi WO (Weakness & Opportunities)

Fasilitator dapat mendampingi masyarakat agar pelaksanaan program BSPS bisa sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam petunjuk teknis (juknis) BSPS, masyarakat penerima bantuan harus membuat perjanjian dengan suplier agar proses distribusi bahan bangunan tidak terjadi kendala keterlambatan waktu pekerjaan dengan didampingi oleh fasilitator.

Strategi ST (Strenghts & Threats)

Apabila terjadi perubahan regulasi yang baru maka Pemerintah Pusat harus segera berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah agar pada saat proses pelaksanaan tidak terjadi kendala yang dapat menghambat program BSPS. Saling membantu dalam penggunaan pekerja atau tukang seperti contoh satu minggu dirumah si A satu minggu kemudian dirumah si B atau dapat mencari tukang dari kampung sebelah. Semua proses administrasi harus segera dilengkapi agar dapat melakukan penarikan dana dengan cepat dan segera dibayarkan ke toko bangunan supaya tidak terjadi kendala distribusi material yang disebabkan oleh cuaca yang tidak menentu.

Strategi TW (Threaths & Waekness)

Harus dilakukan penambahan tenaga pada saat cuaca bagus dan bahan bangunan harus di stok. Harus dilakukan pendampingan secara terus menerus agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan tujuan, Pada saat akan mulai proses pekerjaan harus dibuat komitmen dengan tukang agar dapat menyelesaikan pekerjaan hingga selesai dan komitmen dengan toko bangunan agar bahan bangunan tidak terlambat untuk didatangkan,



Gambar 8. Rumah penerima bantuan BSPS sebelum dan sesudah dikerjakan

Sumber: Pangestu, Y, 2023 (Dokumen Pribadi)

SIMPULAN

Sesudah penelitian dilakukan pada proses pelaksanaan BSPS di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok tahun anggaran 2023 maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: Pelaksanaan program BSPS di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok tahun anggaran 2023 yang dilakukan di dua Nagari yaitu Nagari Surian dan Nagari Lolo sudah terealisasi dengan baik karena factor-faktor rumah layak huni yang tertera didalam petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh pemerintah sudah terpenuhi semua, walaupun untuk aspek penilaian air minum yang layak masih termasuk kategori Cukup Sesuai (CS) dikarenakan banyaknya masyarakat yang mengakses air minum mengandalkan air sawah untuk MCK maupun mata air yang dialiri dengan slang air kerumah – rumah. Sedangkan efektifitas pelaksanaan dapat dilihat keswadayaan masyarakat sangat bagus sebab rumah lama sebelum dilakukan pekerjaan masih banyak rumah strukturnya masih menggunakan kayu, namun setelah dilakukan proses tahapan pelaksanaan rumah menjadi layak huni dengan terpenuhinya standar rumah layak huni yang dibuat oleh pemerintah, meskipun begitu pada saat tahapan pelaksanaan masih ditemui kendala seperti susahnya mencari tukang, cuaca yang sering tidak menentu sehingga mengganggu pekerjaan, juga ada masyarakat yang merubah ukuran rumah pada proses pelaksanaan dimana pada tahap awal sosialisasi fasilitator menyarankan rumah untuk dibuat dengan ukuran 36 M² tidak ada kamar tidur namun ada masyarakat yang membuat ukuran rumah lebih dari itu dan mempunyai kamar tidur, namun pada akhirnya masyarakat penerima bantuan dapat menyelesaikan pekerjaan sebelum habis kontrak pelaksanaan. Supaya tahapan pelaksanaan program BSPS bisa berjalan dengan lancar untuk periode berikutnya maka penulis sudah membuat analisis dengan menggunakan metode SWOT, untuk dapat menilai kekuatan dan kelemahan yang ada dari dalam dan juga mampu membaca peluang serta ancaman yang datang dari luar dan juga telah dilakukan penyusunan strategi supaya proses pelaksanaan bisa berjalan dengan baik seperti dengan adanya masyarakat yang mau berswadaya ditambah dengan adanya fasilitator pendamping maka

program BSPS dapat dikontrol dengan baik untuk apa saja dana bantuan dapat dimanfaatkan dan sisanya dapat menggunakan swadaya dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyanti, Utari, and W Widjonarko. 2017. "Evaluasi Program Perumahan Swadaya Di Kabupaten Boyolali." 5(1): 71–80. Universitas Diponegoro
- Dharma, Budi, and Matius Bangun. 2022. "Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kota Subulussalam Provinsi Aceh." Universitas Darma Agung
- Esariti, Landung, Fitri Fauziah, and Artiningsih Artiningsih. 2020. "Implementasi Pengarusutamaan Gender Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Hunian Pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kota Semarang." *Jurnal Permukiman* 15(2): 107.
- Farida, Ida. 2020. "Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Pada Dinas Perumahan Dan Permukiman Di Kabupaten Subang." *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 7: 35–47. ISSN 2614-2945.
- Herlina, Dewi, Zuhri Nawawi, and Tuti Anggraini. 2021. "Analisis Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Menyediakan Rumah Layak Huni Di Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi." *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume VII No. 1: 144–57.
- Iskandar, Ismawaty. 2018. "Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto." Universitas Bosowa
- Jannah, Hartin Miftahul, Herwan Sastrawan, and Harinida Wahyuni Adda. 2023. "Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol." *Jurnal Jempper* 2(2). E-ISSN : 2809-6037 P-ISSN : 2809-5901
- Direktorat Jendral Perumahan Kementrian PUPR. 2021. *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya*. Jakarta: Kementrian PUPR.
- Kumar, Rohit, and Adhikari Dina. 2020. 18 *Bulletin of Earthquake Engineering 2015 Nepal Earthquake : Seismic Performance and Post - Earthquake Reconstruction of Stone in Mud Mortar Masonry Buildings*. Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/s10518-020-00834-y>.
- Malkanov, Ikhwan, and Mayani. 2021. "Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi." 8(1601110248): 1–19. Universitas Riau
- Nursifa. 2021. "Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Basi Kecamatan Basidondo Kabupaten Toli Toli." 1(12). *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol.1 No.12 Mei 2021.
- Puryanto, and Rahmad Rosadi. 2021. "Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019." *Ensiklopedia Social Review* 3(1): 85–91.
- Rahmayani, Elsa. 2019. "Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Terhadap Masyarakat Kurang Mampu Di Nagari Bukit Tandang Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok." Universitas Negeri Padang.
- Rismanita, Islaeny, Zaili Rusli, and Harapan Tua. 2020. "Impelemtasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 15(4): 589–98.
- Rizky, Dinnie Ananda, Suprpto Siswosukarto, and Ashar Saputra. 2022. "Analisis Prioritas Pengendalian Resiko Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Provinsi Sumatera Utara." *Juitech* Vol 6(1): 9–21. e-ISSN : 2597-7261
- Setiyarini, Altesa Wahyudiana, and Anantha Prathama. 2019. "Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Sambigede Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur." *Public Administration Journal*, 3(1), 1-10.
- Siregar, Hairani, and Sovia Fardila. 2019. "Sosialisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BspS) Di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat." *Literasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Inovasi* (2023) 3(1): 471–74.
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Kecamatan Pantai Cermin Dalam Angka*. Kabupaten Solok
- Undang-Undang No 1 Tahun. 2011. *Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman*. Jakarta: Kementrian PUPR
- Widoyoko, Eko Putro. 2022. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: PUSTAKA BELAJAR.